BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Sejarah kelistrikan di Indonesia dimulai pada pertengahan abad ke-19. Sejak jaman Belanda, penguasaan dan pengusahaan Listrik di Indonesia dipegang dan diselenggarakan secara monopoli oleh perusahaan-perusahaan swasta Belanda, seperti:

1. Di Jakarta (dulu Batavia), penguasaan dan pengusahaan pelistrikan dieksploitir oleh O.G.B.M *(Overzeese Gemeeschappeljik Electriciet Maatschappij)*.
2. Di Jawa Barat (Bandung), penguasaan listrik mula-mula dilakukan oleh B.E.M *(Bandoengsche Electriciet Maatschappij)*.
3. Di Jawa Tengan dan Jawa Timur, penguasaan dan pengusahaan pelistrikan dieksploitir oleh A.N.I.E.M *(Algemeene Electriciet Maatschappij)*.

Pada zaman penjajahan Jepang perusahaan listrik tersebut bernama *Seibu Jawa Denhijigyo Kosha.* Setelah Indonesia merdeka, perusahaan listrik tersebut diambil alih dan namanya diubah menjadi Jawatan Listrik dan Gas. Perusahaan Listrik dan Negara (PLN) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30

tahun 1970. Adapun sejarah singkat dari PT PLN (Persero) P3B Region Jawa Barat, adalah sebagai berikut:

Pada tahun 1906, didirikan PLTA Pakar, pada aliran sungai Cikapundung dengan kapasitas terpasang 800 kW dan Maskapai Listrik Bandung *(Bandung Electriciet Maatschapping)* sebagai langkah awal untuk pengoperasian energi listrik dengan tenaga air.

Pada tahun 1917, Biro Tenaga Air *(Waterkrach Bureaw)* dari Jawatan Pekeretaapian Negara *(Staatzz Foorwagen)* dari status perusahaan Negara diubah menjadi Jawatan tenaga air dan Listrik. Jawatan ini tidak hanya mengurus pembelian lisensi-lisensi untuk tenaga air dan listrik, tetapi juga melakukan pengawasan instalasi-instalasi listrik dan lisensi-lisensi diseluruh Indonesia.

Pada tahun 1920 Perusahaan Listrik Umum Bandung dan sekitarnya *(Gemceanschappilijik Electriceitsbederiif Bandung En Omstreken)*, disingkat dengan GEBEC, mengambil alih PLTA Pakar di Bandung dan PLTA Cijedil di Cianjur. Selanjutnya bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan Listrik Negara untuk pemberian listrik kepada konsumen Direksi Bagian Swasta yang dikelola oleh NV. Maintz & Co.

Pada tahun 1934, *Dients Voor Waterkrach Electricities* (WE) diubah menjadi *Electricities Wezen* (EW) atau Perusahaan Tenaga Air Negara Dataran Tinggi Bandung yang mempunyai dua kelompok PLTA, yaitu PLTA Bangkok dengan kapasitas terpasang 3 x 1050kW dan PLTA Dago dengan kapasitas terpasang 1 x 700kW yang dibangun pada tahun 1923, dan pada tahun 1923 pada aliran sungai Cikapundung dan Plengen juga dibangun PLTA Dago dengan

kapasitas terpasang 3 x 1050kW kemudian kapasitasnya ditambah sebesar 2000 kW pada tahun 1962. Pada tahun 1924, dibangun PLTA Lamajan dengan kapasitas terpasang 2 x 6400kW kemudian ditambah dengan 6400 kW. Pada tahun 1933 pada aliran sungai Cisangkuy dan Cisarua.

Sebagai cadangan air pada musim kemarau, dibangun danau atau Situ Cileunca pada tahun 1922 dengan kapasitas air 9,89 juta m3. Untuk mencapai jumlah tersebut maka pada tahun 1940 Bendungan Pulo, Palayangan Cipanunjang dipertinggi. Danau ini mendapat pengisian air dari aliran sungai di sekitarnya.

Dari PLTA tersebut dibangun transmisi 30 kV sepanjang 80 km ke Gardu Induk Sumatra, Gardu Induk Munjul, dan Gardu Induk Singaparna untuk menghantarkan tenaga listrik kedaerah Priangan Timur. Selanjutnya pada Gardu Induk Kiaracondong dibangun transmisi 30 kV ke Gardu Induk Rancaekek Sumedang untuk daerah priangan Utara hingga Parakan Muncang dan telah menjadi 70 kV dari Sumedang ke Kiaracondong yang dioperasikan oleh PLN Distribusi.

Pada tahun 1928, pada PLTA Lamajang dibangun penghantar 30 kV ke Gardu Induk Plengen-Purwakarta, sekarang penghantar tersebut telah menjadi 70 kV untuk memasok daerah Priangan Barat, pada tahun 1966 dibangun penghantar Kosambi-Cawang. Selain itu pada tahun 1920 juga dibangun PLTA Dayeuhkolot dan sekarang Gardu Induk ini tidak beroperasi lagi. Pada tahun 1928 Central Electriesch Laboratorium (CEL) yang berada dikomplek sekolah tinggi yang meliputi pekerjaan laboratorium dan perbaikan alat listrik, kini CEL telah diserahkan kepada Institute Teknologi Bandung (ITB). Pada tahun 1933

beroperasi PLTA Cikalong (3 x 6400 kW) yang bekerja pararel dengan PLTA-PLTA yang telah ada. PLN sektor priangan mempunyai empat gardu induk utama, yaitu:

1. Gardu Induk Bandung Utara untuk daerah utara.
2. Gardu Induk Cigereleng untuk daerah selatan.
3. Gardu Induk Padalarang untuk daerah barat.
4. Gardu Induk Ujungberung untuk daerah timur.

Perubahan-perubahan nama PLN Pusat Penyaluran dan Pengatur Beban (P3B) Jawa Bali Region Jawa Barat, yaitu:

1. Pada tahun 1951 sampai tahun 1960 nama jawatan listrik menjadi Perusahaan Listrik untuk Pembangkit Tenaga Listrik. (PANUPETEL).
2. Pada tahun 1960 sampai tahun 1974 berubah menjadi Perusahaan Listrik Negara Eksploitasi XII.
3. Pada tahun 1975 sampai tahun 1983 berubah menjadi Perusahaan Listrik Negara Pembangkit III.
4. Pada tahun 1984 sampai dengan tahun 1986 diubah menjadi Pembangkit Listrik Jawa Barat dan Jakarta Raya.
5. Pada tahun 1987 sampai dengan 2 Oktober tahun 1995 berubah menjadi PLN Pembangkit dan Penyaluran Jawa Bagian Barat yang membawahi 16 sektor Pembangkit dan Penyaluran yang salah satunya Sektor Priangan.
6. Mulai 1 Agustus 1994 sampai sekarang PLN Pusat berubah status menjadi PT.PLN (Persero).

7. Dari tanggal 3 Oktober 1995 sampai 31 Maret 2000 PLN Pembangkit dan Penyaluran Jawa Bagian Barat menjadi PT. PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Sektor Priangan.
8. Pada tanggal 1 April tahun 2001 sampai sekarang berubah menjadi PT. PLN (persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Jawa Bali Region Jawa Barat.

Dengan terbitnya Surat Keputusan Direksi PT PLN (persero) No.257.K/010/DIR/2000, tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Bisnis Strategi Penyaluran dan Pusat Pengaturan Beban Jawa Bali, maka PT PLN (persero) P3B yang merupakan inti pusat (*profit center)* berubah menjadi unit pusat insvestasi (*investment center)* dengan nama Unit Bisnis Strategi Penyaluran dan Pusat Pengaturan Beban Jawa Bali (UBS P3B).

Perubahan tersebut menuntut adanya kajian ulang atas organisasi PT PLN (persero) P3B yang antara lain mencakup revisi atas visi dan misi organisasi, rekayasa ulang proses bisnis menuju ke arah yang lebih efisien, serta pengembangan usaha, pengembangan potensi pegawai, pembentukan budaya perusahaan, serta pengelolaan perubahan organisasi. Tetapi pada tahun 2002 PT PLN (persero) UBS P3B berubah kembali menjadi PT PLN (persero) P3B.

4.1.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Dalam pengelolaan perusahaan perlu adanya penyusunan organisasi yang diselaraskan dengan fungsi yang ada. Penerapan pola organisasi yang ada perlu

dilakukan untuk meningkatkan fleksibilitas, efektifitas, dan efisiensi kerja dengan memperhatikan fungsi organisasi.

Struktur organisasi yang terdapat di PT PLN (Persero) P3B Jawa Bali Region Jawa Barat digunakan sebagai sistem informasi dalam pelaksanaan tugas tenaga kerja, menggambarkan tanggung jawab masing-masing bagian, memperlihatkan garis kewenangan dan jalur koordinasi yang harus diakui oleh para tenaga kerja serta jalur kerja sama antar bagian dalam perusahaan.

Dengan adanya struktur organisasi di PT PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur (P3B) Jawa Bali Region Jawa Barat, ini diharapkan agar tercipta koordinasi yang dapat mengarahkan semua kegiatan perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

PT PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur (P3B) Jawa Bali Region Jawa Barat secara garis besar mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

1. Manager Region

Manager region membawahi dan mengkoordinasikan ketujuh deputi manager dan dibantu oleh dua orang manajer yaitu, Manajer Pelayanan Transmisi dan Manajer Unit Jasa Teknik. Unit kerja yang bertanggung jawab langsung kepada dan dibawahi Koordinasi Manager Region, terdiri dari:

a. Deputi Manager Enginering
b. Deputi Manager Konstruksi
c. Deputi Manager Operasi Sistem
d. Deputi Manajer Pemeliharaan
e. Deputi Manajer SDM & Administrasi

f. Deputi Manajer Keuangan.

g. Deputi Manajer Hukum dan Lingkungan

2. Deputi Manager Konstruksi

Deputi Manager Konstruksi membawahi dan mengkoordinasikan 2 orang yaitu:

1. Supervisor Pengendalian Konstruksi.
2. Supervisor Admnistrasi Teknik.

3. Deputi Manager Operasi Sistem

Deputi Manager operasi Sistem dibantu oleh tiga orang Supervisor , yaitu:

1. Supervisor Perencanaan dan Analisis Sistem
2. Supervisor Transaksi Tenaga Listrik
3. Supervisor Pengendalian Operasi Real Time

4. Deputi Manager Pemeliharaan

Deputi Manager Pemeliharaan membawahi 4 orang Supervisor , yaitu:

1. Supervisor Pemeliharaan Transmisi
2. Supervisor Proteksi, Meter, Scada, & Telekomunikasi
3. Supervisor PDKB TT dan TET
4. Supervisor Assesmen dan Diagnosa Transmisi

5. Deputi Manager SDM dan Administrasi

Deputi Manajer SDM dan Administrasi membawahi dua orang Supervisor, yaitu:

1. Supervisor Sumber Daya Manusia
2. Supervisor Administrasi dan Fasilitas

6. Deputi Manajer Keuangan

Deputi Manajer Keuangan dibantu oleh dua orang Supervisor , yaitu ;

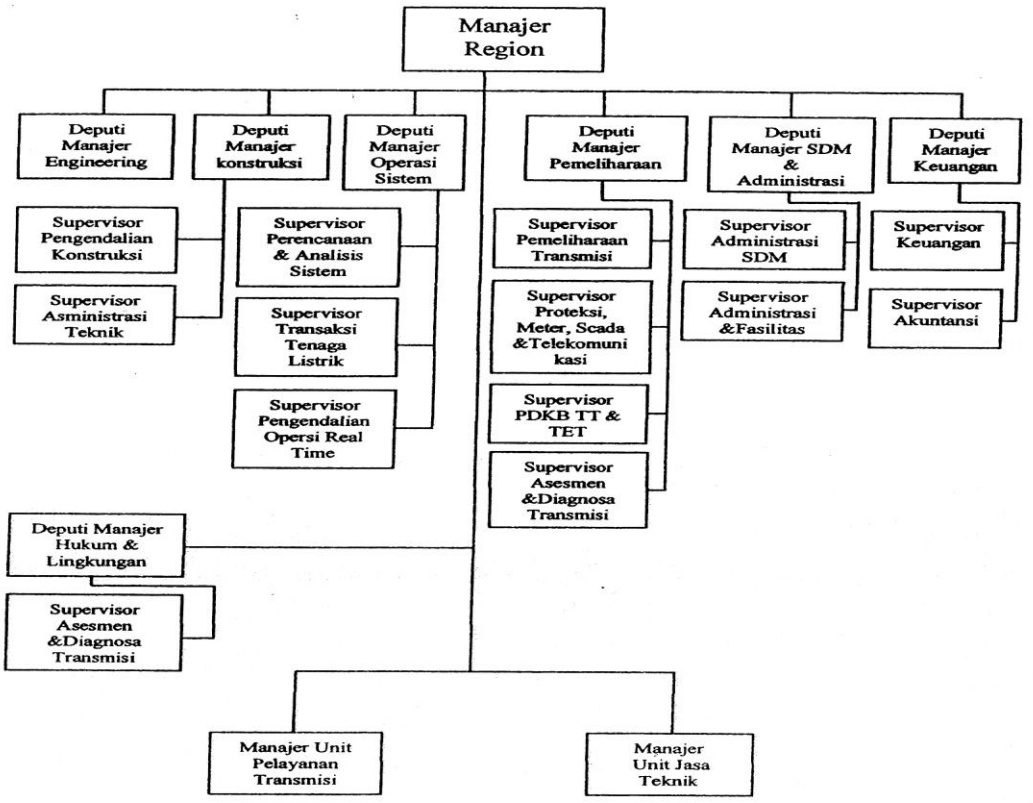
1. Supervisor Keuangan
2. Supervisor Akuntansi

7. Deputi Manajer Hukum dan Lingkungan

Deputi Manajer Hukum dan Lingkungan ini hanya membawahi Supervisor Assesmen dan Diagnosa Transmisi saja.

STRUKTUR ORGANISASI PT. PLN (PERSERO) P3B JAWA BALI REGION

JAWA BARAT



Struktur Organisasi PT PLN (Persero) P3B Jawa Bali Region Jawa Barat.

4.1.1.3 Uraian Tugas

1. Manager Region

Tugas pokok menager region adalah sebagai berikut :

a. Menentukan kebijakan perusahaan dengan memperhatikan kebijakan yang telah digariskan Dewan Direksi PT PLN (Persero), mengkordinasikan semua bagian dalam perusahaan.

b. Merumuskan dan menetapkan rencana kerja perusahaan, memecahkan masala-masalah yang timbul pada pelaksanaan umum perusahaan.

c. Memberikan pertanggung jawaban mengenai seluruh kegiatan perusahaan dalam bentuk laporan.

d. Pengawasan dan pengendalian investasi.

e. Mengadakan hubungan dengan pihak luar terutama mengenai hal-hal yang kebijakan pengembangan perusahaan dan kebijakan lainnya yang bersifat umum.

2. Deputi Manager keuangan

Mempunyai tujuan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan anggaran operasi dan anggaran investasi, pengelolaan RKAP, pengelolaan arus kas serta pengelolaan akuntasi untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan pendanaan dan arus kas yang akurat serta ketepatan waktu penyajian akuntansi dan pelaporan keuangan.

Untuk melaksanakan tujuan sebagaimana tersebut diatas, manager keuangan mempunyai tugas utama sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kegiatan bidang Keuangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
2. Mengkoordinasikan penyusunan RKAP serta revisis RKAP sebagai bahan usulan kekantor P3B Jawa Bali.
3. Melaksanakan pengontrolan alokasi anggaran sesuai RKAP untuk memastikan ketepatan pemanfaatan anggaran.
4. Mengkoordinasikan Pembuatan Laporan Realisasi RKAP serta Permohonan ajuan AT serta Permohonan tunai operasi dan investasi untuk menjamin tersedianya dana sesuai kebutuhan pembayaran.
5. Menetapkan sistem, prosedur dan tata kerja administrasi anggaran, keuangan, akuntansi region untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan.
6. Mengendalikan fungsi back up eksternal audit di regionnya untuk memastikan semua kegiatan telah sesuai peraturna yang berlaku.
7. Mengendalikan dan mengalokasikan tunai ke UJT dan UPT sesuai dengan aliran kas dan rencana kerja yang telah ditentukan.
8. Mengendalikan pembayaran kepada pihak intern dan ekstern dan memastikan bahwa pembayaran telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Menetapkan proyeksi pendapatan dan proyeksi laba sebagai bahan dalam pengambilan keputusan manajemen dan RKAP.
10. Merekomendasikan Laporan Pembukuan dan Lampirannya, serta Laporan Manajemen.

11. Mengimplementasikan dan meningkatkan perbaikan secara berkesinambungan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 dilingkungannya.
12. Membina dan mengembangkan kompetensi SDM untuk memenuhi kebutuhan kompetensi jabatan.
13. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan langsung sesuai lingkup tugas, tanggung jawab dan kompetensinya.
14. Menyusun laporan secara berkala sesuai bidang tugasnya sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

3. Supervisor keuangan

Mempunyai tujuan untuk Mengelola sub bidang keuangan dan akuntansi yang meliputi verifikasi keabsahan, kebenaran dan kelengkapan bukti transaksi sampai menjadi laporan Arus Kas dan melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak serta proses akuntansi sampai menjadi laporan keuangan untuk mengetahui kinerja Region.

Untuk melaksanakan tujuan sebagaimana tersebut diatas, manager keuangan mempunyai tugas utama sebagai berikut ;

1. Membuat rencana kegiatan sub bidang Keuangan.
2. Merancang penyusunan sistem, prosedur dan tata kerja keuangan untuk pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan.
3. Mengendalikan dan mengawasi kebutuhan & dropping tunai anggaran operasi dan investasi Region sesuai dengan RKAP/disbursement serta

kebutuhan anggaran di luar RKAP untuk menjamin tersedianya likuiditas.

4. Memeriksa bukti penerimaan & pengeluaran kas/bank dan cek/bilyet giro kantor Region dengan bukti-bukti pendukungnya untuk mengecek kebenaran, kelengkapan dan keabsahannya.
5. Memeriksa buku harian kas/bank dengan bukti pengeluaran dan penerimaan kas/bank, berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi bank kantor Region untuk mengetahui saldo harian dan memastikan saldo menurut fisik sama dengan saldo menurut buku.
6. Memeriksa daftar laporan kiriman uang, laporan arus kas serta bukti pendukungnya, dan laporan pajak-pajak untuk laporan ke P3B dan KPP setempat.
7. Mengusulkan penyelesaian permasalahan yang dihadapi sub bidang keuangan dan akuntansi untuk bahan pengambilan keputusan manajemen.
8. Mengimplementasikan dan meningkatkan perbaikan secara berkesinambungan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 dilingkungannya.
9. Membina dan mengembangkan kompetensi SDM untuk memenuhi kebutuhan kompetensi jabatan.
10. Menyusun laporan secara berkala sesuai bidang tugasnya sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

11. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan langsung sesuai lingkup tugas, tanggung jawab dan kompetensinya.

4. Supervisor Akuntansi

Adapun tujuannya yaitu untuk mengelola sub bidang keuangan dan akuntansi yang meliputi verifikasi keabsahan, kebenaran dan kelengkapan bukti transaksi dan melakukan perhitungan, pajak serta proses akuntansi sampai menjadi laporan keuangan untuk mengetahui kinerja Region.

Untuk melaksanakan tujuan sebagaimana tersebut diatas, manager keuangan mempunyai tugas utama sebagai berikut :

1. Membuat rencana kegiatan sub bidang Keuangan dan Akuntansi.
2. Merancang penyusunan sistem, prosedur dan tata kerja keuangan dan akuntansi untuk pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan.
3. Memeriksa bukti penerimaan & pengeluaran kas/bank kantor Region dengan bukti-bukti pendukungnya untuk mengecek kebenaran, kelengkapan dan keabsahannya.
4. Memeriksa jurnal (J 01 s.d. J 98) untuk memastikan kebenaran dalam pembebanan kode akun.
5. Mengevaluasi Laporan Keuangan UPT dan UJT untuk proses konsolidasi laporan keuangan Region.
6. Memeriksa laporan keuangan Region beserta lampirannya untuk mengetahui kinerja keuangan Region.
7. Memantau aplikasi akuntansi biaya yang berbasis pada aktivitas untuk menghitung biaya per level tegangan.

8. Memeriksa usulan penarikan aktiva operasi menjadi tidak operasi ke P3B untuk proses pemindahan status aktiva.
9. Mengusulkan penyelesaian permasalahan yang dihadapi sub bidang akuntansi untuk bahan pengambilan keputusan manajemen.
10. Mengimplementasikan dan meningkatkan perbaikan secara berkesinambungan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 dilingkungannya.
11. Membina dan mengembangkan kompetensi SDM untuk memenuhi kebutuhan kompetensi jabatan.
12. Menyusun laporan secara berkala sesuai bidang tugasnya sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
13. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan langsung sesuai lingkup tugas, tanggung jawab dan kompetensinya.

4.1.1.4 Aspek Kegiatan Perusahaan

Tugas pokok yang diemban PT PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Jawa Bali Region Jawa Barat sesuai dengan pelaksanaan monopoli transmisi, pengelola operasi sitem dan transaksi tenaga listrik berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 005./K/DIR/2004 adalah bertanggung jawab atas pengelolaan serta pemeliharaan sarana sistem pengaturan pengendalian tenaga listrik di wilayah tenaga kerjanya, melaksanakan manajemen konstruksi sistem penyaluran dan memperhatikan faktor lingkungan hidup dan prasyarat regulasi disektor tenaga kelistrikan, memberdayakan dan

mengembangkan seluruh potensi sumber guna memperoleh pendapatan diluar usaha pokok.

Kemudiaan PT PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Jawa Bali Region Jawa Barat memiliki fungsi yang sangat penting dalam mengelola sistem tenaga listrik Jawa Bali, khususnya dalam manajemen sistem kelistrikan yang meliputi pengoperasian, pemeliharaan dan pengembangan jaringan transmisi yang menghubungkan pusat-pusat pembangkit listrik dengan pelanggan. Wilayah kerja perusahaan terdiri dari dua unit, yaitu:

1. **Unit pelayanan teknik (UPT),** yang terdiri dari:
    a. UPT Karawang.
    b. UPT Purwakarta.
    c. UPT Bandung barat.
    d. UPT Bandung timur.
    e. UPT Garut.
    f. UPT Cirebon.
    g. UPT Bekasi.
2. **Unit jasa teknik**, yang terdiri atas:
    a. UJT Bandung.
    b. UJT Cirebon.

4.1.1.5 Visi Perusahaan

Visi dari PT PLN (Persero) adalah **“Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul, dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani”.**

Dengan wawasan tersebut PT PLN (Persero) akan survive menghadapi tantangan masa depan berdasarkan visi diatas PT PLN (Persero) menyusun rencana dan strategi jangka panjang dan menengah. Rencana ini bertahap direalisasikan melalui jangka panjang dan jangka pendek dalam rencana Kerja Anggaran Perusahaan pada setiap anggaran.

Dengan moto **"Listrik untuk kehidupan yang lebih baik (*Electricity for A Better Life*)".**

4.1.1.6 Misi Perusahaan

Pada PT PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Jawa Bali Region Jawa Barat, mempunyai misi perusahaan, sebagai berikut:

1. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham.
2. Menjadi tenaga sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

4.1.2 Data Perusahaan

4.1.2.1 Pelaksanaan Penerapan Metode Penyusutan Aktiva Tetap Pada PT.PLN (Persero)

Kebijakan perusahaan yang mengatur tentang penerapan metode penyusutan aktiva tetap di lingkungan kerja PT.PLN (Persero) P3B JB Region

Jawa Barat mengacu pada Surat Edaran Perusahaan Listrik Negara Nomor : 025.E/87/DIR/1997 tentang Pedoman Kebijakan Akuntansi Sistem Buku Besar Dan Laporan Keuangan PT. PLN (Persero), Adapun tujuan dari dikeluarkannya surat edaran ini yaitu :

1) Memberlakukan kebijakan akuntansi, sistem buku besar dan pelaporan keuangan PT. PLN diseluruh satuan administrasi.
2) Sistem buku besar tersebut digunakan untuk menunjang pelaksanaan komputerisasi akuntansi diseluruh satuan administrasi dalam rangka percepatan dan akurasi laporan keuangan.

Ruang lingkup surat edaran ini meliputi :

1) Kebijakan akuntansi yang mencakup pengertian, pengakuan, pengukuran serta penyajian dan pengungkapannya dalam akun buku besar atas transaksi keuangan agar diperoleh keseragaman pelakuan akuntansinya.
2) Sistem buku besar yang digunakan untuk mengelompokan transaksi keuangan yang sama / sejenis.
3) Jurnal standar yang digunakan untuk mencatat data transaksi keuangan sesuai dengan kelompok / jenis transaksi.
4) Penyajian dan penyampaian laporan keuangan.
5) Dan lain-lain

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 0591.K/DIR/2005 tentang Perubahan Masa Manfaat Aktiva Tetap Dan Perhitungan Biaya Penyusutan Aktiva Tetap.

Dalam surat keputusan ini menetapkan bahwa :

1. Perhitungan biaya penyusutan aktiva tatap didasarkan atas masa manfaat dari tiap jenis aktiva tetap yang dihitung secara bulanan / tahunan dan pembebanannya dilakukan pada setiap akhir periode pembukuan penyusutan aktiva tetap dihitung sejak bulan pengoperasian dan atau bulan perolehan aktiva tetap.
2. Masa manfaat tiap jenis aktiva tetap diatur oleh keputusan direksi.
3. Perhitungan biaya penyusutan aktiva tetap dijelaskan sesuai dengan lampiran surat keputusan direksi.
4. Dengan diterapkannya Surat Keputusan Direksi PLN Nomor :0591.K/DIR/2005 maka Surat Keputusan Direksi PLN Nomor : 054/DIR/1988 tentang "Perubahan Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap" dan masa manfaat berdasarkan revaluasi aktiva tetap dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kebijakan akiuntansi di PT. PLN (Persero) ditetapkan pada tanggal 6 Oktober 1997 oleh Direktur Keuangan akuntansi di PT. PLN (Persero) pada saat itu, salah satu factor pendukung diberlakukannya Standar Akuntansi Keuangan sejak Januari 1995 di Indonesia. Hal ini menyebabkan semua perusahaan yang ada di Indonesia harus mempunyai kebijakan akuntansi yang harus diterapkan pada perusahaan terutama perusahaan yang telah daftar di bursa efek.

Dalam surat edaran No. 025.E/87/DIR/1997 tersebut ditetapkan bahwa kebijakan akuntansi mengenai penyusutan yaitu menggunakan **metode penyusutan garis lurus** karena perhitungannya lebih sederhana dan mudah digunakan dalam praktek menentukan beban penyusutan aktiva baik untuk aktiva tetap maupun untuk material cadangan.

4.1.2.2 Pelaksanaan Pelaporan Penyusutan Aktiva Tetap Pada PT. PLN (Persero)

Adapun pelaksanaan penyusutan aktiva tetap pada PT. PLN dalam laporan berupa rekapitulasi aktiva tetap baik menurut fungsi dan jenis dihitung seluruh tahun perolehannya biasanya dicatat setiap periode bulanan.

Bahwa dalam pelaporan penyusutan di PT.PLN (persero) penyaluran dan pusat pengatur beban Jawa Bali region Jawa Barat itu dibuatkan dalam rekapitulasi aktiva menurut klasifikasinya yaitu Rekapitulasi aktiva tetap menurut jenis dan fungsinya. Dimana penghitungan biaya penyusutan aktiva tetap didasarkan atas manfaat dari tiap jenis aktiva tetap yang bersangkuan yang dihitung secara bulanan / tahunan dan pembebanannya dilakukan tiap akhir periode pembukuan. Penyusutan aktiva tetap dihitung sejak bulan pengoperasian dan atau bulan perolehan aktiva tetap.

Isi dari laporan rekapitulasi aktiva tetap yaitu :

1) Nama Jenis adalah nama yang merupakan aktiva tetap yang terdapat di suatu perusahaan.
2) Harga perolehan adalah Jumlah uang atau yang dapat disetarakan dengan uang yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu aktiva yang diperlukan
3) Beban penyusutan adalah biaya yang dibebankan terhadap produksi akibat penggunaan aktiva tetap itu dalam proses produksi
4) Akumulasi penyusutan adalah jumlah dari keseluruhan penyusutan terhadap aktiva yang mengalami penurunan masa manfaat

5) Nilai buku adalah harga pada saat aktiva tersebut diperoleh yang pada banyak kasus adalah sama dengan harga belinya yang dikurangi dengan sejumlah depresiasi yang telah dibebankan selama umur penggunaan aktiva tersebut.

Dibawah ini merupakan contoh suatu Laporan penyusutan Aktiva tetap yaitu:

Tabel 4.1

Contoh Laporan rekapitulasi aktiva tetap

REKAPITULASI AKTIVA TETAP MENURUT JENIS DAN FUNGSI
SELURUH TAHUN PEROLEHAN
S/D PERIODE : 31/AUGUST/2009

Nama jenis	Harga perolehan	Beban penyusutan bulan ini	Beban penyusutan s.d bulan ini	Akumulasi Penyusutan	Nilai buku

Sumber : PT. PLN, 2009

Dari jenis-jenis aktiva diatas merupakan bagian dari sebagian aktiva tetap yang dimilki oleh PT. PLN (persero)P3BJB.

Yang termasuk aktiva tetap menurut Fungsi adalah Rumah dinas yang dimana merupakan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan bagi para pegawainya.

Sedangkan aktiva tetap menurut jenis adalah Tanah, Gedung, danKomputer Micro

4.2 Pembahasan

Dalam pembahasan hasil penelitian pada PT. PLN (Persero) adapun pelaksanaannya yaitu mengenai metode penyusutan aktiva tetap dan pelaksanaan pelaporan aktiva tetap.

4.2.1 Analisis Penerapan Metode Penyusutan Aktiva Tetap Pada PT. PLN (Persero)

Berdasarkan Surat Edaran Perusahaan Listrik Negara Nomor: 025.E/87/DIR/1997 tentang Pedoman Kebijakan Akuntansi, Sistem Nuku Besar Dan Pelaporan Keuangan PT.PLN (Persero) menyatakan bahwa metode penyusutan yang diterapkan di lingkungan kerja PT.PLN (Persero) menggunakan metode penyusutan garis lurus karena caranya sederhana dan mudah dalam menentukan tarif penyusutan aktiva, sehingga tidak ada kesalahan dalam memasukkan atau menginput data aktiva tetap yaitu persentase tetap dari harga perolehan atau nilai lain, pengganti harga perolehan, persentase penyusutan ini berbeda untuk tiap jenis aktiva tetap. Persentase penyusutan aktiva tetap diatur berdasarkan Surat Keputusan Direksi.

Aktiva tetap yang ada di PT.PLN (Persero) terdiri dari Aktiva Tetap dan Material Cadangan. Aktiva Tetap merupakan aktiva berwujud termasuk material cadangan dan hak atas tanah yang dimiliki dan atau dikuasai oleh perusahaan :

1. Untuk digunakan dalam fungsi pembangkitan, transmisi dan distribusi listrik
2. Untuk menunjang kegiatan fungsi tersebut diatas
3. Untuk disewakan kepada pihak ketiga

Diharapkan akan dapat digunakan selama lebih dari satu tahun, dan harga perolehannya diatas jumlah minimal yang ditetapkan Direksi.

Kata " dimiliki " mengandung pengertian bahwa aktiva tetap yang bersangkutan secara yuridis terdapat bukti-bukti kepemilikan perusahaan.

Sedangkan " dikuasai " mengandung pengertian bahwa aktiva tetap yang bersangkutan dibawah penguasaan dan pengendalian perusahaan dan digunakan untuk kegiatan operasi secara terus menerus.

Adapun aktiva tetap yang dimliki di PT. PLN (Persero) P3BJB sebagai berikut :

Aktiva Tetap			
Kode	Jenis	Kode	Fungsi
01	Tanah	111	PLTA
02	Bangunan dan kelengkapan halaman	112	PLTU
03	Bangunan saluran air	113	PLTD
04	Jalan sepur samping	114	PLTG
05	Instalasi dan mesin	115	PLTP
06	Reaktor nuklir	116	PLTGU
07	Perlengkapan penyaluran Tenaga listrik	117	PLTN
08	Gardu induk	120	Transmisi
09	Saluran udara tegangan tinggi	130	Teleinformasi data
11	Kabel bawah tanah	140	Distribusi
12	Jaringan distribusi	150	UPD
13	Gardu distribusi	160	TUL
14	Perlengkapan lain-lain distribusi	171	Tata usaha
15	Perlengkapan pengolah data	172	Gudang dan persediaan
16	Perlengkapan transmisi data	173	Bengkel
17	Perlengkapan telekomunikasi	174	Laboratorium
18	Perlengkapan umum	175	Jasa teknik
19	Kendaraan bermotor	176	Sistem telekomunikasi
21	Material cadangan	177	Wisma dan rumah dinas
		178	rupa-rupa jasa umum
		179	Pendidikan dan latihan

Material cadangan adalah sparepart yang dibeli untuk menjamin keandalan penyaluran dan pendistribusian tenaga listrik. Material cadangan dicacat dalam aktiva tetap dan disusutkan selama umur aktiva tetap induknya.

Aktiva pada PT. PLN begitu banyaknya, disini penulis hanya mengambil beberapa contoh dalam penghitungan penyusutan aktiva tetap menggunakan metode gari lurus sebagai berikut :

Tabel 4.2

Kartu Aktiva Tetap untuk Rumah Dinas

KARTU AKTIVA TETAP

Pusat Aktivitas : Rumah dinas Gitet Tasikmalaya
Nomor AT : 17610210100112080001
Kode Aktiva : 176102101001
Nama Akuntansi : Gedung – gedung batu
Perolehan Awal : 98.846.459
Masa Manfaat : 25 tahun (Dalam Rp)

Penghitungan

BULAN/TAHUN	BEBAN PENYUSUTAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NIALI BUKU
S/D 01-2009		2.965.392	95.881.067
02-2009	329.488	3.294.880	95.551.579
03-2009	329.488	3.624.368	95.222.091
04-2009	329.488	3.953.856	94.892.603
05-2009	329.488	4.283.344	94.563.115
06-2009	329.488	4.612.832	94.233.627
07-2009	329.488	4.942.320	93.904.139
08-2009	329.488	5.271.808	93.574.651
09-2009	329.488	5.601.296	93.245.163
10-2009	329.488	5.930.784	92.915.675
11-2009	329.488	6.260.272	95.586.187
12-2009		6.589.760	92.256.699

Perolehan untuk nilai buku yaitu nilai perolehan – akumulasi penyusutan yaitu Rp 98.846.459- Rp 2.965.392 = Rp. 95.881.067.

Untuk menghitung beban penyusutannya nilai perolehan / masa manfaat dan selama bulan penggunaannya

Rp 98.846.459 / (25/12) = Rp 329.488 kemudian ditambahkan dengan akumulasi penyusutan maka Rp 329.488 + Rp 2.965.392 = Rp 3.294.880 untuk nilai akumulasi penyusutan

Jadi Rp 329.488 + Rp 2.965.392 = Rp 3.294.880 untuk akumulasi penyusutan kemudian Rp 95.881.067 – Rp 329.488 = Rp 95.551.579 untuk nilai buku

dan seterusnya sampai nilai buku tersebut habis

Tabel 4.3

Kartu Aktiva Tetap untuk Tanah Milik

KARTU AKTIVA TETAP

Pusat Aktivitas : GI.500/150 KV BDSLN
Nomor AT : 07-01/2010/0001
Kode Aktiva : 120101101001
Nama Akuntansi : Tanah Milik
Perolehan : 185.850.000
Masa Manfaat : 0 tahun (Dalam Rp)

Perhitungan

BULAN/TAHUN	BEBAN PENYUSUTAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NIALI BUKU
S/D 01-2009			185.850.000
02-2009	0	0	185.850.000
03-2009	0	0	185.850.000
04-2009	0	0	185.850.000
05-2009	0	0	185.850.000
06-2009	0	0	185.850.000
07-2009	0	0	185.850.000
08-2009	0	0	185.850.000
09-2009	0	0	185.850.000
10-2009	0	0	185.850.000
11-2009	0	0	185.850.000
12-2009		0	185.850.000

Perolehan untuk nilai buku yaitu nilai perolehan – akumulasi penyusutan yaitu Rp 185.850.000 – 0 = Rp 185.850.000

Untuk menghitung beban penyusutannya nilai perolehan / masa manfaat dan selama bulan penggunaannya

Rp 185.850.000 / (0/12) = 0 kemudian ditambahkan dengan akumulasi penyusutan maka 0 + 0 = 0

Jadi 0 + 0 = 0 untuk akumulasi penyusutan kemudian

Rp 185.850.000 – 0 = Rp 185.850.000 untuk perolehan nilai buku dan seterusnya sampai nilai buku tersebut habis.

Untuk tanah tidak ada beban penyusuta, dimana tanah memiliki masa manfaat yang tidak terbatas, sehingga atas aktiva tetap tanah tidak dilakukan penyusutan. Sedangkan pengeluaran untuk memperpanjang hak atas tanah diperlukan sebagai biaya operasi.

Tabel 4.4

Kartu Aktiva Tetap Untuk Gedung-gedung Batu

KARTU AKTIVA TETAP

Pusat Aktivitas : Kantor region JABAR
Nomor AT : 12010210100109090001
Kode Aktiva : 120102101001
Nama Akuntansi : Gedung – gedung batu
Perolehan Awal : 111.867.978
Masa Manfaat : 37 tahun (Dalam Rp)

Penghitungan

BULAN/TAHUN	BEBAN PENYUSUTAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NIALI BUKU
S/D 01-2009		0	111.867.978
02-2009	0	0	111.867.978
03-2009	0	0	111.867.978
04-2009	0	0	111.867.978
05-2009	0	0	111.867.978
06-2009	0	0	111.867.978
07-2009	0	0	111.867.978
08-2009	0	0	111.867.978
09-2009	251.954	251.954	111.616.024
10-2009	251.954	503.908	111.364.070
11-2009	251.954	755.862	111.112.116
12-2009	251.954	1.007.816	110.860.162

Perolehan untuk nilai buku yaitu nilai perolehan – akumulasi penyusutan yaitu Rp 111.867.978 - 0 = Rp 111.867.978 Untuk menghitung beban penyusutannya nilai perolehan / masa manfaat dan selama bulan penggunaannya Rp 111.867.978 / (37/12) = Rp 251.954 kemudian ditambahkan dengan akumulasi penyusutan maka

Rp 251.954 + 0 = Rp 251.954 untuk nilai akumulasi penyusutan Jadi Rp 251.954 + 0 = Rp 251.954 untuk akumulasi penyusutan kemudian Rp 111.867.978 – Rp 251.954 = Rp 111.616.024 untuk perolehan nilai buku dan seterusnya sampai nilai buku tersebut habis.

Tabel 4.5

Kartu Aktiva Untuk Komputer Micro

KARTU AKTIVA TETAP

Pusat Aktivitas : Seksi keuangan/Anggaran
Nomor AT : 24061/04/018.015
Kode Aktiva : 171118102018
Nama Akuntansi : Komputer Micro
Perolehan Awal : 16.830.000
Masa Manfaat : 5 tahun (Dalam Rp)

Penghitungan

BULAN/TAHUN	BEBAN PENYUSUTAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NIALI BUKU
S/D 01-2009		14.025.000	2.805.000
02-2009	280.500	14.305.500	2.524.500
03-2009	280.500	14.586.000	2.244.000
04-2009	280.500	14.866.500	1.963.500
05-2009	280.500	15.147.000	1.683.000
06-2009	280.500	15.427.000	1.402.500
07-2009	280.500	115.708.000	1.122.000
08-2009	280.500	15.988.500	841.500.000
09-2009	280.500	16.269.000	561.000.000
10-2009	280.500	16.549.000	280.500
11-2009	280.500	16.830.000	0
12-2009	280.500	16.830.000	0

Perolehan untuk nilai buku yaitu nilai perolehan – akumulasi penyusutan yaitu Rp 16.830.000 – Rp 14.025.000 = Rp 2.805.000. Untuk menghitung beban penyusutannya nilai perolehan / masa manfaat dan selama bulan penggunaannya 16.830.000 / (5/12) = Rp 280.500 kemudian ditambahkan dengan akumulasi penyusutan maka Rp 280.500 + Rp 14.025.000 = Rp 14.305.500 untuk nilai akumulasi penyusutan Jadi Rp 280.500 + Rp 14.025.000 = Rp 14.305.000 untuk akumulasi penyusutan kemudian Rp 2.805.000 – Rp 280.500 = Rp 2.524.500 untuk nilai buku dan seterusnya sampai nilai buku tersebut habis.

Aktiva tetap yang telah habis disusut tetapi masih terus dioperasikan, maka harga perolehan berikut dengan akumulasi penyusutannya tetapi dicantumkan dalam neraca.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Biaya Penyusutan :

1. Harga Perolehan

   Harga Perolehan adalah jumlaah uang atau yang dapat disetarakan dengan uang yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu aktiva yang diperlukan. faktor yang paling berpengaruh terhadap biaya penyusutan.

2. Nilai Residu

   Merupakan taksiran nilai atau potensi arus kas masuk apabila aktiva tersebut dijual pada saat penarikan/penghentian aktiva. Nilai residu tidak selalu ada, ada kalanya suatu aktiva tidak memiliki nilai residu karena aktiva tersebut tidak dijual pada masa penarikannya

3. Umur Ekonomis Aktiva

   Sebagian besar, aktiva tetap memiliki 2 jenis umur, yaitu :

Umur fisik : Umur yang dikaitkan dengan kondisi fisik suatu aktiva. Suatu aktiva dikatakan masih memiliki umur fisik apabila secara fisik aktiva tersebut masih dalam kondisi baik (walaupun mungkin sudah menurun fungsinya).

Umur Fungsional : Umur yang dikaitkan dengan kontribusi aktiva tersebut dalam penggunaanya. Suatu aktiva dikatakan masih memiliki umur fungsional apabila aktiva tersebut masih memberikan kontribusi bagi perusahaan. Walaupun secara fisik suatu aktiva masih dalam kondisi sangat baik, akan tetapi belum tentu masih memiliki umur fungsional. Bisa saja aktiva tersebut tidak difungsikan lagi akibat perubahan model atas produk yang dihasilkan, kondisi ini biasanya terjadi pada aktiva mesin atau peralatan yang dipergunakan untuk membuat suatu produk. Atau aktiva tersebut sudah tidak sesuai dengan zaman (*not fashionable*), kondisi ini biasanya terjadi pada jenis aktiva yang bersifat dekoratif (misalnya : *furniture*/mebeler, hiasan dinding, dsb).

4. Pola Penggunaan Aktiva

   Pola penggunaan aktiva berpengaruh terhadap tingkat ke-aus-an aktiva, yang mana untuk mengakomodasi situasi ini biasanya dipergunakan metode penyusutan yang paling sesuai.

Apabila terjadi perubahan metode penyusutan dalam hal ini perubahan kebijakan akuntansi maka perubahan tersebut harus dikonfirmasikan dan alasan perubahan harus diungkapkan.

Jurnal yang dilakukan pada saat akhir periode yang dicatat dalam buku harian memorial yaitu :

Tabel 4.6

Jurnal Umum

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Biaya penyustan		Xx	
	Akumulasi Penyusutan			xx

Sumber : PT. PLN, 2009

PT. PLN (Persero) P3B Jawa Barat Region Jawa Barat menerapkan kebijakan akuntansi untuk penyusutan aktiva tetap yaitu dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus, persentase penyusutan ini berbeda untuk tiap jenis aktiva tetap. Persentase penyusutan aktiva tetap diatur berdasarkan Surat Keputusan Direksi.

Kendaraan lebih dapat disusutkan dengan metode aktivitas karena kendaraan lebih banyak aus karena dipakai dibandingkan dengan tua karena waktu.

Metode ini menganggap aktiva tetap akan memberikan kontribusi yang merata (tanpa fluktuasi) disepanjang masa penggunaannya, sehingga aktiva tetap akan mengalami tingkat penurunan fungsi yang sama dari periode ke periode hingga aktiva diarik dari penggunaannya.

Adapun kekurangan dan kelebihan dalam menggunakan metode garis lurus dalam penyusutan aktiva tetap itu adalah sebagai berikut :

A. Kelebihan :

a) Mudah digunakan dalam praktek menentukan beban penyusutan aktiva
b) Lebih mudah dalam menentukan tarif penyusutan aktiva tetap
c) Pada PT. PLN sudah menggunakan sistem komputerisasi, sehingga memudahkan dalam penentuan beban penyusutannya.

B. Kelemahan :

a) Apabila salah memasukan atau menginput data aktiva tetap, maka hasil yang diperoleh tidak akan sesuai.
b) Sistem yang digunakan pada PT. PLN hanya dapat dipakai pada satu tempat komputer saja tidak bisa dipakai secara bersamaan, sehingga akan menghambat dalam penyelesaian laporan.

4.2.2 Analisis Pelaksanaan Pelaporan Penyusutan Aktiva Tetap Pada PT. PLN (Persero)

PT. PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali Region Jawa Barat dalam pelaksanaan pelaporan penyusutan aktiva tetapnya disajikan dalam bentuk rekapitulasi penyusutan secara keselurahan sesuai dengan periode bulannya sebelum dimasukan kedalam laporan keuangan yang ada dalam neraca, karena telah menggunakan suatu sistem aplikasi.

Tabel 4.7
Laporan Rekapitulasi Aktiva Tetap

REKAPITULASI AKTIVA TETAP MENURUT JENIS DAN FUNGSI
SELURUH TAHUN PEROLEHAN
S/D PERIODE : 31/AUGUST/2009

(Dalam Rp)

Nama jenis	Harga perolehan	Beban penyusutan bulan ini	Beban penyusutan s.d bulan ini	Akumulasi Penyusutan	Nilai buku
Rumah dinas	98.846.459	329.488	2.635.904	32.948.800	93.574.651
Tanah	185.850.000	0	0	0	185.850.000
Gedung	111.867.978	0	0	0	111.867.978
Komputer Micro	16.830.000	280.500	2.244.000	120.054.000	841.500

Untuk menentukan penghitungan laporan dalam rekapitulasi aktiva tetap sebagai berikut :

1. Harga perolehan didapat dari kartu aktiva tetap pada nilai perolehan awal aktiva tersebut dimiliki atau diperoleh.
2. Beban penyusutan bulan ini pada Rumah dinas diperoleh dari kolom beban penyusutan pada bulan yang diinginkan misalnya bulan Agustus terjadi penyusutan sebesar Rp 329.488, Begitupun aktiva yang lain.
3. Beban penyusutan s.d bulan ini diperoleh dari penjumlahan dari bulan pertama memperoleh aktiva sampai bulan yan sedang dipakai saat ini misalnya pada rumah dinas beban penyusutan tiap bulannya adalah

   Rp 329.488 maka dikalikan untuk mempermudah sebanyak bulan yang telah dipakai 8 bulan. Maka Rp 329.488 * 8 bln = Rp 2.635.904

4. Akumulasi penyusutan diperoleh dari penjumlahan akumulasi dari bulan pertama sampai bulan yang sedang dipakai saat ini misalnya pada Rumah dinas yaitu bulan pertama sampai bulan saat ini atau bulan yang dicari

   2.965.392+3.294.880+3.624.368+3.953.856+4.283.344+4.612.832+

   4.942320+5.271.808 = Rp 32.948.800

5. Nilai buku diperoleh dari aktiva tetap pada bulan yang diinginkan atau yang Misalnya pada Rumah dinas untuk bulan agstus nilai bukunya sebesar Rp 93.574.6

Adapun kekurangan dan kelebihan dalam menggunakan metode garis lurus dalam penyusutan aktiva tetap itu adalah sebagai berikut :

A. Kelebihan :
   a) Dalam pembuatan laporan rekapitulasi sudah menggunakan sistem berbasis komputer, sehingga memudahkan dalam pengerjaannya
   b) nilai perolehan yang disajikan dalam laporan mencerminkan nilai sesungguhnya

B. Kelemahan :
   a) Apabila salah memasukan atau menginput data aktiva tetap, maka hasil yang diperoleh tidak akan sesuai.
   b) Sistem yang digunakan pada PT. PLN tidak bisa dipakai secara bersamaan, sehingga akan menghambat dalam penyelesaian laporan.